

**ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA (APBDES) DI DESA SILANCA  
KECAMATAN LAGE**



Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi  
Universitas Sintuwu Maroso

Oleh

Marta Kristina Samba

91911404122048

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO  
POSO  
2023**

**MARTA KRISTINA SAMBA,91911404122048. Analysis of Village Revenue and Expenditure Budget Management at Silanca Village in Lage Sub District.**  
Supervised by Kisman Lantang and Tabita R.Matana.

## **ABSTRACT**

This study aims to determine the Management of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) at Silanca Village in Lage Sub-District. This study uses a qualitative method. The data sources used are primary data and secondary data obtained through observation, documentation, and interview. The population in this study is all financial management report data of Silanca Village, and the sample is financial report data for 2020-2022.

The results of the research based on the 2020-2022 show that the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) management process at Silanca Village in Lage Sub-District, seen from the planning, implementation, administration, and reporting processes, has been carried out properly according to Minister of Home Affairs Regulations Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management. However in the accountability process there are delays caused by a lack of understanding of human resources. This requires guidance from the District Government to the Silanca Village government. The Village Revenue and Expenditure Budget in Silanca Village are based on the principles of transparency and accountability.

Keywords: *Expenditure Budget, Management, Village Revenue*

**Marta Kristina Samba**, Nomor Pokok Mahasiswa : **91911404122048** dengan judul skripsi “**Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Silanca Kecamatan Lage**” di bawah bimbingan **Kisman Lantang** sebagai pembimbing I dan **Tabita R Matana** sebagai pembimbing II.

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Silanca Kecamatan Lage. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara secara langsung terhadap objek yang relevan dengan penelitian ini. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh data laporan pengelolaan keuangan Desa Silanca, sampel dalam penelitian ini yaitu data laporan keuangan tahun 2020-2022.

Hasil penelitian berdasarkan APBDes tahun 2020-2022 ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan APBDes di Desa Silanca Kecamatan Lage dilihat dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan sudah terlaksana dengan baik sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, namun dalam proses pertanggungjawaban masih ada keterlambatan yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman sumber daya manusia. Hal ini perlu adanya bimbingan dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah Desa Silanca. Anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Silanca sudah berdasarkan asas transparansi dan akuntabilitas.

**Kata Kunci** : APBDes perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR.....</b>	<b>7</b>
2.1 Tinjauan Pustaka .....	7
2.1.1 Pengertian Pendapatan Desa.....	7
2.1.2 Pengertian Belanja Desa .....	7
2.1.3 Transparansi.....	8
2.1.4 Akuntabilitas.....	9
2.1.5 Manajemen Keuangan Daerah.....	10
2.1.6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).....	11
2.1.7 Pengelolaan Keuangan Desa.....	13
2.2 Penelitian Terdahulu.....	17
2.3 Kerangka Pikir.....	19

<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>20</b>
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian.....	20
3.2 Metode Penelitian .....	20
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	21
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	21
3.5 Populasi dan Sampel.....	23
3.6 Teknik Analisis Data .....	23
3.7 Definisi Operasional .....	24
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>26</b>
4.1 Hasil Penelitian.....	26
4.1.1 Gambaran Umum Desa Silanca Kecamatan Lage .....	26
4.1.2 Proses Pengelolaan APBDes di Desa Silanca Kecamatan Lage.....	30
4.2 Pembahasan .....	45
4.2.1 Perencanaan APBDes di Desa Silanca Kecamatan Lage .....	46
4.2.2 Pelaksanaan APBDes di Desa Silanca Kecamatan Lage .....	46
4.2.3 Penatausahaan APBDes di Desa Silanca Kecamatan Lage .....	47
4.2.4 Pelaporan APBDes di Desa Silanca Kecamatan Lage.....	47
4.2.5 Pertanggungjawaban APBDes di Desa Silanca Kecamatan Lage .....	47
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>49</b>
5.1 Kesimpulan.....	49
5.2 Saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>51</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>53</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Desa merupakan tempat yang diberi kewenangan untuk menjalankan dan mengawasi pemerintahannya sendiri. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 yang menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kekuasaan yang dimiliki suatu masyarakat untuk mengendalikan dan menjalankan urusan pemerintahannya disebut otonomi desa.

Pemberlakuan otonomi daerah bagi desa akan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola, mengatur, mengurus daerah secara mandiri. Desa sebagai pemerintahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat menjadi tujuan utama dalam pembangunan pemerintah. Setiap desa diberikan kekuasaan dan sumber daya yang diperlukan untuk mengelola potensi yang dimilikinya dengan tujuan mengembangkan ekonomi lokal dan ketenteraman masyarakat. Pemerintahan desa dilaksanakan oleh kepala desa dengan bantuan perangkat desa sebagai penyelenggara pemerintah desa.

Pemerintah desa harus dapat menerapkan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah sehingga apapun yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku di desa. Selain itu, kinerja pemerintah tergantung pada kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dimaksud yaitu perangkat desa yang akan melakukan tanggung jawab desa. Akuntabilitas dapat dengan mudah dilaksanakan jika desa memiliki aparat yang berkualitas dan memiliki keahlian perhitungan yang baik.

Akuntabilitas yaitu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan memberitahukan kinerja seseorang/pemimpin dalam organisasi terhadap pihak yang berhak untuk meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas akan lebih baik jika didukung dengan sistem akuntansi yang baik sehingga menghasilkan informasi yang tepat waktu, akurat, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Desa mempunyai kesempatan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, ada banyak cara yang dapat dilakukan seperti pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha pertanian seperti kopra dan padi, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), serta adanya dana desa.

Dana desa diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan desa, meningkatkan perekonomian dalam desa, mengatasi masalah yang berhubungan dengan

pembangunan desa serta memperkuat masyarakat sebagai subjek dari pembangunan. Untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa salah satu faktor yang membantu yaitu adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pelaksanaan dan pengelolaan keuangan desa harus dilakukan sesuai dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif, dan disiplin anggaran yang dikelola selama 1 (satu) tahun berjalan terhitung dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember.

Mardiasmo, (2009) mendefinisikan anggaran sebagai pernyataan tentang kinerja yang diharapkan untuk dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam Permendagri 20 Tahun 2018 terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa.

Rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan diputuskan bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan ditetapkan oleh peraturan desa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam Permendagri nomor 113 Tahun 2014. Pemerintah desa bertanggung jawab mengelola keuangan desa harus secara tertib, benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, terbuka, dan akuntabel dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan umum.

Penelitian ini dilakukan di Desa Silanca yang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Lage Kabupaten Poso yang sebagian mata pencaharian masyarakatnya bergerak di bidang pertanian, buruh tani, dan PNS. Peneliti memiliki ketertarikan pada Desa Silanca mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dikarenakan APBDes mempunyai implikasi yang sangat besar dalam pembangunan desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara desa Ibu Yulistin Salianggo, mengatakan bahwa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan tentang pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Silanca sudah terlaksanakan dengan baik, namun dalam proses pertanggungjawaban APBDes di Desa Silanca masih terdapat masalah yaitu adanya keterlambatan dalam proses pelaporan pertanggungjawaban APBDes yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman pemerintah desa terkait dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Hasil dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki beberapa persamaan diantaranya jenis dan metode penelitian yang digunakan dan permasalahan yang akan diteliti, sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu diantaranya lokasi dan waktu penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan permasalahan yang ada di Desa Silanca yang berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan

judul “Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Silanca Kecamatan Lage”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu bagaimana pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Silanca Kecamatan Lage?.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas yaitu untuk mengetahui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Silanca Kecamatan Lage.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bermanfaat untuk beberapa pihak antara lain:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan dalam bidang pendidikan khususnya dalam implementasi teori-teori yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

#### **2. Bagi peneliti lainnya diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dalam melaksanakan penelitian yang sama.**

### 3. Manfaat Praktis.

- a. Bagi peneliti diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan pengembangan ilmu pengetahuan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- b. Bagi desa diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan dan koreksi bagi pihak berwenang dalam hal ini Desa Silanca Kecamatan Lage.
- c. Bagi fakultas, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah referensi kepustakaan di Fakultas Ekonomi khususnya Program Studi Manajemen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akuntansi, J., Ekonomi, M. d a n Laia, A., Telaumbanua, A., & Harefa, A. R. (2022). *Analisis Pengelolaan Keuangan Di Desa Angorudua Balaekha. 1*(2), 312–319.
- Anu, P., Hasan, K., & N, I. D. (2022). *Dan Belanja Desa Pada Desa Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Batu Tahun 2020. 20*, 1295–1303.
- Azizah, W. (2018). *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Andayani Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*.
- Sriwijaya, U. (2022). *Kecamatan Lempung Kabupaten Oki Tahun Anggaran 2020 Skripsi " Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDesa ) di Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki Tahun Anggaran 2020 "*.
- Chichilia, M., & Joseph, K. (2019). *Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Inobonto Ii Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow*. JAIM: Jurnal Akuntansi Manado, 3(2), 1–9.
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo*. Journal of Economic, Management, Accounting and Technology, 3(2), 92–107. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283>
- Okta Dini Vitri. (2022). *Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Gobah Kecamatan Tambang)*. 1–78. <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/59794>
- Purba, T. F., & . M. (2022). *Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Di Desa Tanjung Raja Kecamatan Stm Hulu Kabupaten Deli Serdang*. JRAM(Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma), 8(2), 131–136. <https://doi.org/10.30743/akutansi.v8i2.4772>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peaturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Peraturan Peerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Ummah, N. N., & Wijayanti, R. R. (2022). *Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa*

*Klenang Lor Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo. Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis, 2(1), 55–59.*  
<https://doi.org/10.25047/asersi.v2i1.3251>

Zalukhu, R. N. (2020). *Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Di Desa Lauru I Afulu Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara, Medan. Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara., 1–92.*